

Laporan Kinerja

INSPEKTORAT V

INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2022



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Laporan Kinerja Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Internal Pemerintah. serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat V, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2022. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2022 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 2 Januari 2023
Inspektur V,

Muhammad Rizal
NIP 196801181997031002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja di Inspektorat V, Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Inspektorat V melaksanakan “Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi” dalam mendukung capaian “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, dengan Sasaran Kegiatan berdasarkan Rencana Strategis adalah “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V”, diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V.

Kinerja Inspektorat V ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu realisasi IKK 1.5, Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V adalah 88% dari Target 78%. Hal ini juga meningkat dari tahun 2021, sehingga pelaksanaan penugasan menjadi semakin efektif.

Pencapaian kinerja kegiatan tersebut menggunakan sumber daya sebesar Rp1.796.433.000,00 atau sebesar 99,53% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.805.000.000,00 dengan capaian fisik (*output*) sebesar 110,56%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp2.166.324.000,00 dengan peningkatan realisasi *output* laporan dari 179 LHP (tahun 2021) menjadi 308 LHP (tahun 2022) atau meningkat sebesar 58,11% dari tahun sebelumnya.

Realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar 99,53% dari alokasi yang disediakan. Penyerapan anggaran sudah optimal dan mampu melakukan penghematan mencapai 70,06% dari pagu awal sebelum revisi. Sementara dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 ini Inspektorat V mampu melakukan penghematan senilai Rp369.891.000,00 atau sebesar 17,07% dari tahun 2021.

Pencapaian kinerja yang meningkat ini disebabkan keberhasilan dalam mengelola penugasan AREPP serta peningkatan koordinasi Inspektorat V dengan pihak Unit Organisasi SIBB dan Bina Konstruksi dalam kepedulian/*awareness* penerapan SPIP dan Manajemen Risiko.

Kinerja Inspektorat V dalam pengawalan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan di Kementerian PUPR tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pengawasan yang bersifat rutin dan *mandatory*, namun juga upaya perbaikan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan penugasan dan pelaporan kinerja baik untuk pegawai maupun Unit Kerja Inspektorat V.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	5
2.2. Perjanjian Kinerja	8
2.3. Metode Pengukuran	9
2.4. Target Tahun 2020 menurut Rencana Strategis	11
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
3.1. Sumber Daya Manusia	13
3.2. Anggaran	16
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
4.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi	20
4.3. Realisasi Anggaran	22
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	24
Lampiran	
Perjanjian Kinerja	



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1a Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 (PK Awal Januari 2022).....	7
Tabel II. 1b Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 (PK Revisi September 2022).....	8
Tabel II. 1c Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 (PK Revisi Desember 2022).....	8
Tabel II. 1d Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 (PK Revisi Desember 2022).....	9
Tabel II. 2 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan	11
Tabel III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	20
Tabel III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan <i>Gender</i>	20
Tabel III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	21
Tabel III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	21
Tabel III. 5 Anggaran Inspektorat V TA. 2022	22
Tabel IV. 1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2022.....	24
Tabel IV. 2 Capaian <i>Output</i> Program dan Capaian <i>Output</i> Kegiatan Tahun 2022	26
Tabel IV. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	28
Tabel IV. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2022 dengan Target Renstra	29
Tabel IV. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2022	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal TA. 2022	2
Gambar II. 1 Dwiperan Inspektorat Jenderal.....	5
Gambar II. 2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	5
Gambar II. 3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal.....	6
Gambar II. 4 <i>Spreadsheet</i> Pemantauan Penugasan	13
Gambar II. 5 <i>Spreadsheet</i> Pemantauan Penugasan	14
Gambar II. 6 <i>Google Drive</i> Dokumentasi Laporan.....	15
Gambar II. 7 <i>Google Drive</i> Monitoring Laporan Kinerja	15
Gambar II. 8 <i>Spreadsheet</i> Pemantauan Cuti.....	15
Gambar II. 9 Indikator Kinerja Program Unor Inspektorat Jenderal	14
Gambar II. 10 <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Program menjadi Indikator Kinerja Kegiatan.....	14
Gambar II. 11 Keterkaitan dan <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Kegiatan dengan Rincian <i>Output</i> (RO) pada Inspektorat V.....	14
Gambar II.12 Tampilan <i>Cascading</i> Rincian <i>Output</i> pada Inspektorat V.....	18
Gambar IV. 1 Kegiatan Reviu RKBMN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024.....	28
Gambar IV. 2 Peserta Kegiatan Reviu RKBMN Kementerian PUPR TA 2024.....	28



DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	19
Grafik III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan <i>Gender</i>	22
Grafik III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	21
Grafik III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	22
Grafik IV. 1 Komposisi Capaian Indikator <i>Output</i>	28
Grafik IV. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen s.d. 31 Desember 2022	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Internal Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 Tentang Revisi Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 (Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/IJ/2020 tanggal 21 Januari 2020 Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020);
- e. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

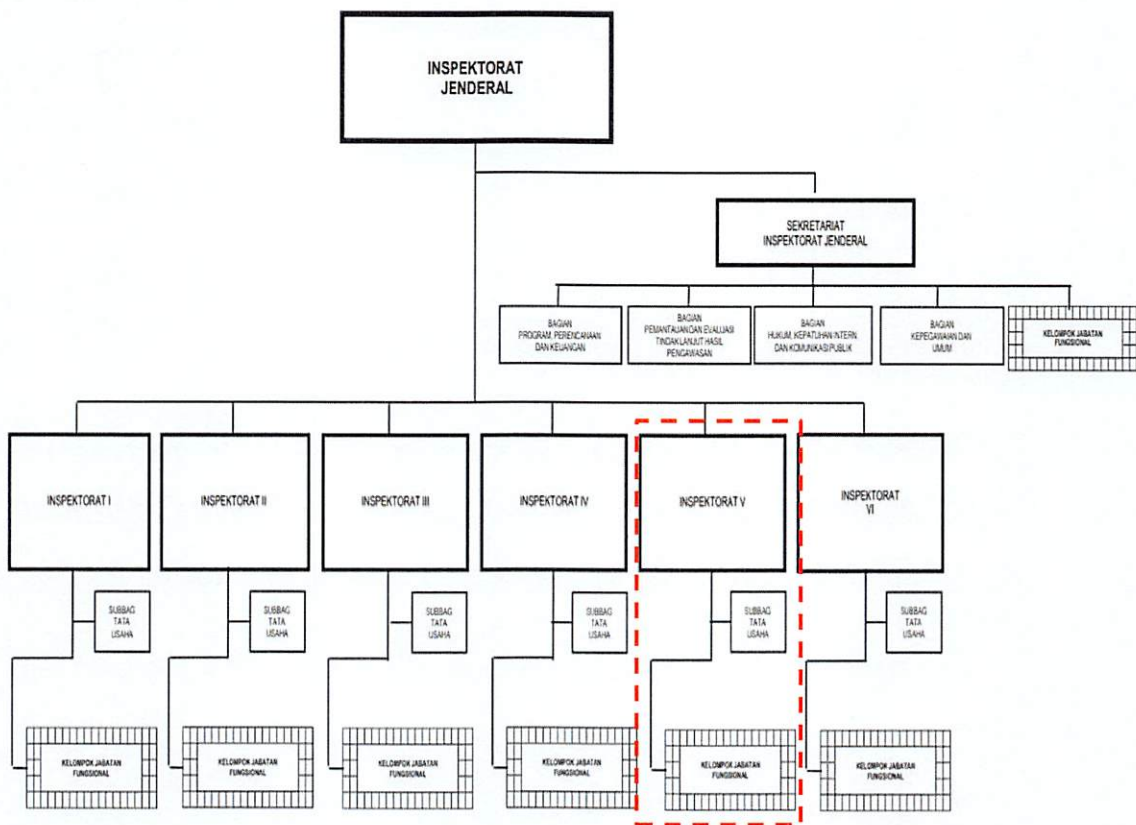
Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat V berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Gambar I. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal TA. 2022

1.4. Isu Strategis

Pemerintah telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi Nasional sejak tahun 2010. Mengacu kepada Sasaran Utama Bidang Aparatur Negara pada RPJMN 2020-2024, yaitu “Birokrasi yang baik dan bersih”, dengan parameter:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel; serta
3. Pelayanan publik yang prima.

Area perubahan dalam Reformasi Birokrasi meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi/Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, Pelayanan Publik.

Kementerian PUPR dalam rangka transformasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian, telah mengimplementasikan 9 (sembilan) Strategi Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

1. Reorganisasi Struktur ULP dan Pokja PBJ;
2. Perkuatan Sumber Daya Manusia;
3. Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. Pembinaan Penyedia Jasa (Konstruksi/Konsultasi);
5. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (*System Delivery*) yang melibatkan BPKP;
6. *Risk Management* di Unor, Balai, dan Satker;
7. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai (Sebagai *second line of defense*);
8. Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kapasitas Auditor Itjen;
9. *Continuous Monitoring* atas Perangkat Pencegahan *Fraud* PBJ dengan *IT Based 4.0*.

Sehubungan dengan perannya dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas serta Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian PUPR, ditetapkan Isu Strategis, sebagai berikut:

a. Isu Strategis Internal

- 1) Masih banyaknya temuan hasil audit BPK yang berpotensi mengakibatkan turunnya opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR;
- 2) Pengawasan Internal belum sepenuhnya dirasakan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- 3) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
- 5) Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan (*Continuous Monitoring – Continuous Audit CACM*);
- 6) Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Isu Strategis Eksternal

- 1) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi pada tingkat Unit Organisasi di Kementerian PUPR dalam rangka mencapai *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- 2) Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengindikasikan masih rendahnya persepsi masyarakat atas kepatuhan terhadap peraturan PBJ di lingkungan Kementerian PUPR;
- 3) Penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, serta tugas direktif dari Presiden;
- 4) Belum optimalnya sinergi bersama Aparat Penegak Hukum sebagai salah satu upaya pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan tugas dan fungsi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024) dan perubahannya, Visi Kementerian PUPR adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

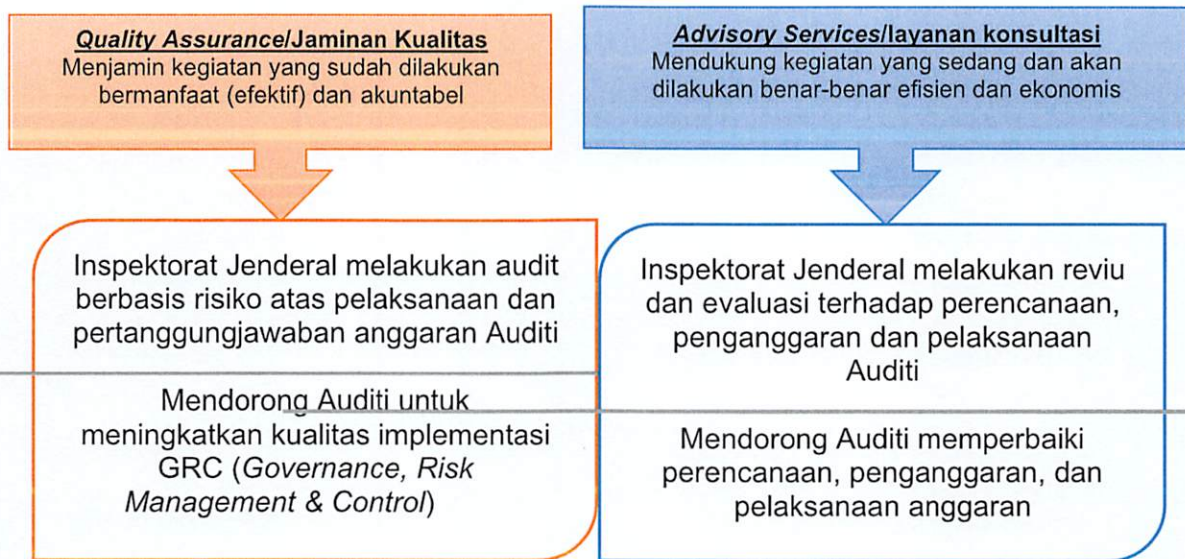
“MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR”

dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.

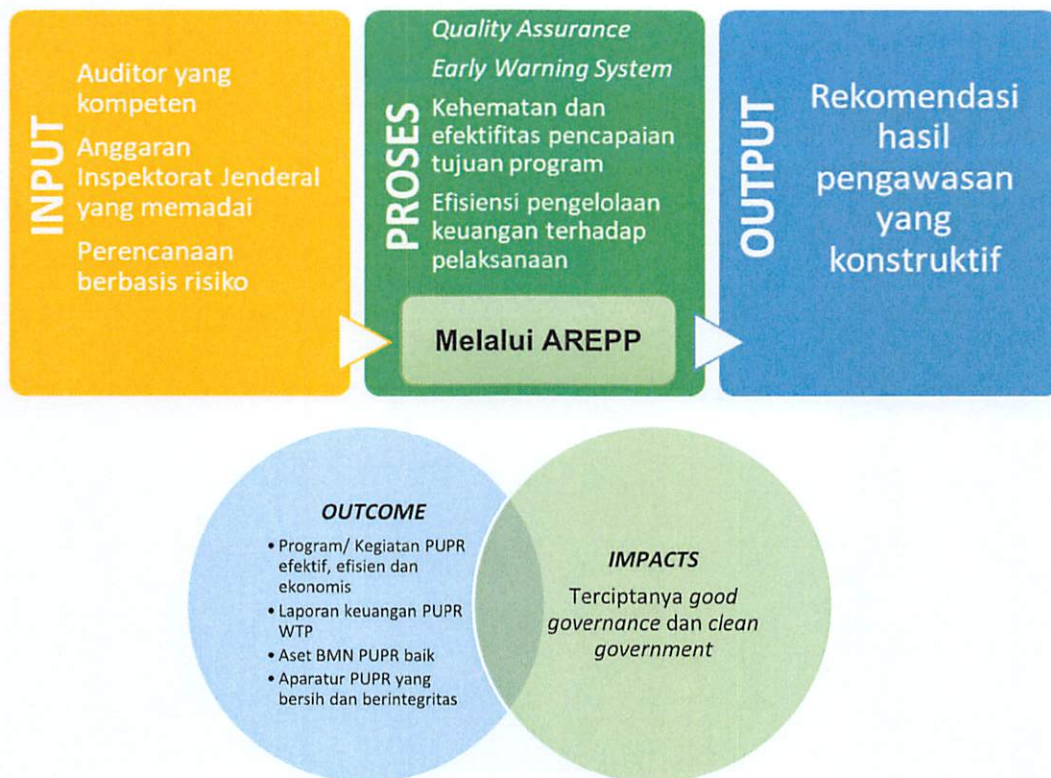
Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.





Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



Gambar II.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

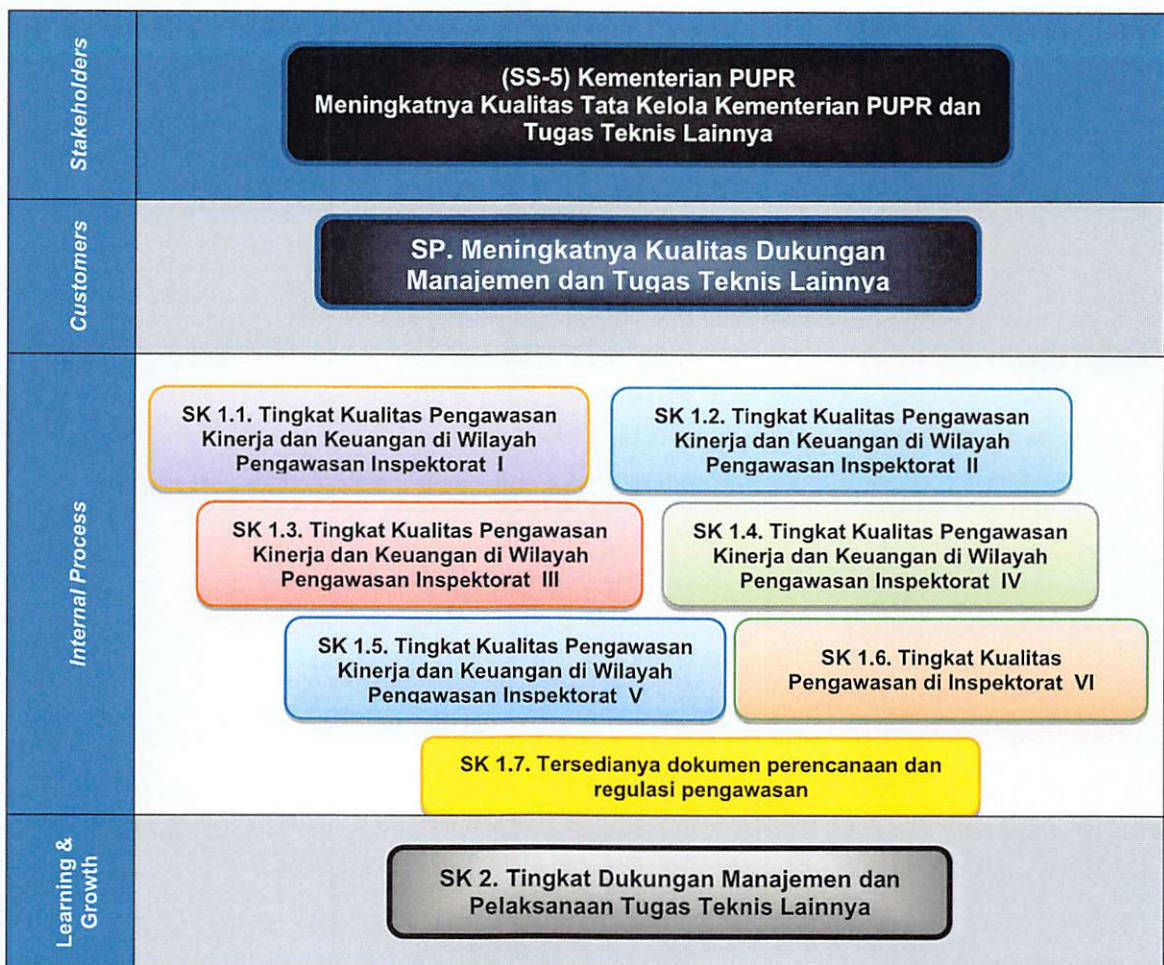
- SS1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau,

SS4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,

SS5. meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya.

Sesuai dengan SEB Bappenas dan Kemenkeu No S-122/MK.02 2020, B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tentang Daftar Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka terdapat perubahan Program serta Struktur Kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya". Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya Sasaran Strategis Kementerian PUPR "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya" (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



Gambar II.3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

SK-1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;

- SK-1.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-1.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SK-1.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
- SK-1.5 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;**
- SK-1.6 Tingkat Kualitas Pengawasan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI;
- SK-1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan;
- SK-2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Inspektorat V memiliki kegiatan berupa Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yaitu Bidang SIBB Binkon (Setjen, Itjen, BPIW, BPSDM, dan Bina Konstruksi) dan *Mandatory*, dengan Sasaran Kegiatan berupa Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V.

Sasaran Kegiatan tersebut diuraikan dalam beberapa indikator kinerja yaitu Nilai Hasil Telaah Sejawat, Persentase Pengawasan, Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan, dan Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I yang terdiri dari Kesesuaian Penilaian Evaluasi Itjen dengan BPKP, Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unor yang dibina, dan Penerapan Manajemen Risiko.

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut menjadi komitmen pimpinan Inspektorat V untuk dilaksanakan, diukur dan dipantau setiap tahun serta didokumentasikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2022, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I–VI untuk Tahun Anggaran 2021. Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1a Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 (PK Awal Januari 2022)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	70%	78%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat V	70%	80%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	85%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	45%	55%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon V		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality assurance</i>)	85%	90%



5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	45%

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V memiliki anggaran senilai Rp6.000.000.000,00.

Pada bulan September terjadi perubahan anggaran sehingga mengakibatkan revisi PK. Untuk target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah PK Inspektur V revisi September:

Tabel II.1b Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 (PK Revisi September 2022)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		BASELINE 2020	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen			
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		70%	78%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90	90
2	Persentase pengawasan di Inspektorat V	70%	80%
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	85%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	45%	55%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon V		
5.1	Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality assurance</i>)	85%	90%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	45%

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V memiliki anggaran senilai Rp5.400.000.000,00.

Pada bulan November terjadi perubahan anggaran kedua, sehingga mengakibatkan Revisi PK. Untuk target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah PK Inspektur V revisi November:

Tabel II.1c Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 (PK Revisi Desember 2022)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		BASELINE 2020	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen			
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		70%	78%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90	90
2	Persentase pengawasan di Inspektorat V	70%	80%
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	85%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	45%	55%



Inspektorat V			
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon V		
5.1	Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality assurance</i>)	85%	90%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	45%

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V memiliki anggaran senilai Rp2.640.000.000,00.

Pada bulan Desember terjadi perubahan anggaran ketiga, sehingga mengakibatkan Revisi PK. Untuk target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah PK Inspektur V revisi Desember 2022:

Tabel II.2d Perjanjian Kinerja Inspektur V Tahun 2022 (PK Revisi Desember 2022)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		BASELINE 2020	TARGET 2022
PROGRAM : Dukungan Manajemen			
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		70%	78%
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90	90
2	Persentase pengawasan di Inspektorat V	70%	80%
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	85%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	45%	55%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon V		
5.1	Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality assurance</i>)	85%	90%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	45%

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V memiliki anggaran senilai Rp1.805.000.000,00.



2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon II Inspektorat V, yang sudah ditetapkan pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 maupun Dokumen Renstra Inspektorat V Tahun 2020-2024. Indikator tersebut sudah melalui evaluasi dan reviu baik oleh internal Inspektorat Jenderal maupun eksternal seperti Biro Perencanaan bahkan Kementerian PAN RB, sehingga indikator-indikator tersebut sudah memenuhi syarat IKK yang *SMART* (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant dan Time Bound*)

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan adalah dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut.

Berikut ini adalah Metode Pengukuran persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II. 2:

Tabel II.2 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V (25%)	80%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	55%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	70%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>) (40%)	90%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	45%

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya);
- Persentase Pengawasan**, diperoleh dari realisasi Jumlah LHP AREPP dibagi dengan target LHP Inspektorat V pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), kumulatif bulanan (sumber data sistem informasi EPTLHP);
- Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan yang masuk dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti, kumulatif bulanan;

d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan data jumlah rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja baik eksternal maupun internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan (sumber data Bagian PETLHP);

e. **Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I**, yang dijabarkan menjadi:

- 1) **Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*)** dengan hasil penilaian BPKP (*quality Assurance*), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir Evaluasi SPIP Unit Organisasi yang dibina oleh Tim Itjen dibandingkan dengan hasil QA BPKP;
- 2) **Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina**, diperoleh dari penilaian terakhir Evaluasi SPIP Unit Organisasi yang dibina oleh Tim Itjen;
- 3) **Persentase Penerapan Manajemen Risiko**, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko pada Unit Organisasi yang dibina dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja yang ada pada Unor tersebut.

Dalam perkembangannya, terdapat risiko terkait pencatatan dan pengukuran kinerja yang tidak tercatat dalam Sistem EPTLHP, sehingga Inspektorat V harus membuat mitigasi terhadap permasalahan tersebut, agar kinerja dapat tetap tercatat dan diukur.

Sistem pencatatan dan pengukuran tersebut sebagian besar menggunakan Sistem Aplikasi E-PTLHP (Elektronik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan). Namun beberapa data kinerja masih belum dapat dicatat pada sistem aplikasi tersebut, sehingga Unit Kerja Inspektorat V menggunakan *Worksheet/Spreadsheet* Pemantauan Kinerja yang dibuat menggunakan aplikasi *Google Workspace* dan *Google Drive*. Penggunaan *Worksheet* dari aplikasi ini memiliki keunggulan yaitu *input* data dapat dikerjakan bersama-sama dan *update* secara *real time*.

Worksheet Kinerja yang dimiliki Inspektorat V terdiri atas Pemantauan Penugasan AREPP, Pemantauan Pengaduan, Fasilitas Penyimpanan Laporan Hasil Pengawasan, Fasilitas Penyimpanan Laporan Monitoring dan Evaluasi, dan Pemantauan Cuti Pegawai. *Worksheet* Kinerja ini dapat diakses oleh seluruh pegawai Inspektorat V, sehingga setiap pegawai dapat terus memantau hasil kerjanya, dan pimpinan Unit Kerja/Inspektur dapat memantau kinerja setiap saat dan menjadi masukan bagi keputusan pimpinan dalam menyesuaikan strategi dan aktivitas pelaksanaan tugas.

Berikut ini adalah contoh tampilan/*dashboard* beberapa *spreadsheet* yang digunakan oleh Inspektorat V:

2022 - Spreadsheet Pemantauan LHP												
Inspektorat V												
NOTA DIRAS												
No	Widada	Nota Diras	Tanggal Monev	Nama Status	Status Kerja	Tempat Kerja	Tempat Audit	Pengawasan	Notasi	Periode	Periode	
92	334/ND/le/2022	07/12/2022	Herman, SE	Lima Pramesia ni, S.I. Kom	ADTT	ADTT	ADTT	ADTT	1877/SPT/ij/2022	8 Desember 2022	8 s.d. 16 Desember 2022	M F He Lo Ha Fa Ex
93	340/ND/le/2022	08/12/2022	Dimas Handi	Dhany Dyan Pradigta, SE, Ak	ADTT	ADTT	ADTT	ADTT	1900/SPT/ij/2022	12 Desember 2022	12 s.d. 13 Desember 2022	M F He Lo Ha Fa Ex
94	343/ND/le/2022	23/12/2022	Dimas Handi	Lima Pramesia ni, S.I. Kom	ADTT	ADTT	ADTT	ADTT	1955/SPT/ij/2022	20 Desember 2022	20 s.d. 21 Desember 2022	M F He Lo Ha Fa Ex
95	344/ND/le/2022	21/12/2022	Ir. Diano, MT	Dhany Dyan Pradigta, SE, Ak	ADTT	ADTT	ADTT	ADTT	1945/SPT/ij/2022	22 Desember 2022	22 s.d. 23 Desember 2022	M F He Lo Ha Fa Ex
96	345/ND/le/2022	23/12/2022	Firman Sug	Indah Ratana, SE, Ak	ADTT	ADTT	ADTT	ADTT	1956/SPT/ij/2022	26 Desember 2022	26 s.d. 30 Desember 2022	M F He Lo Ha Fa Ex

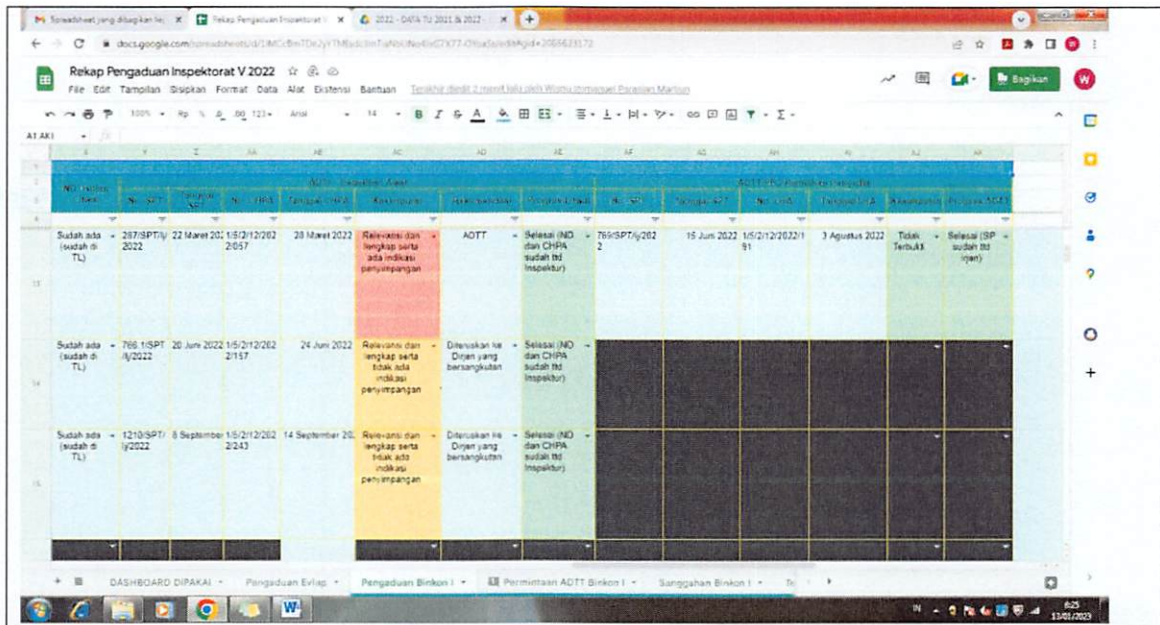


Inspektur V	Tanggal Proses LHP	Ses. Ijèn	Tanggal Proses Ses.Ijèn	Ijèn	Tanggal Proses Ijèn	Status	Penggunaan dan Pengiriman	Substansi ke Kantor/Dinas	Pengiriman Dokumen	Keterangan	Jenis Manufaktur	Link Dokumen
	28/11/2022 11/2/2022					Selesai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tidak Ada Indikasi	Tidak	https://drive.google.com/file/d/1T4DZ1_7yocEg-OLmXAcORGHDKUe8rUw7u5p2shang/view?usp=sharing
	22/12/2022 29/12/2022 30/12/2022		28/12/2022 30/12/2022		02/01/2022	Selesai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tidak	https://drive.google.com/file/d/1T4DZ1_7yocEg-OLmXAcORGHDKUe8rUw7u5p2shang/view?usp=sharing
	28/12/2022 28/12/2022		R 28/12/2022 28/12/2022		30/12/2022	Selesai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tidak	https://drive.google.com/file/d/1T4DZ1_7yocEg-OLmXAcORGHDKUe8rUw7u5p2shang/view?usp=sharing
	27/12/2022 29/12/2022		28/12/2022		29/12/2022	Selesai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tidak	https://drive.google.com/file/d/1T4DZ1_7yocEg-OLmXAcORGHDKUe8rUw7u5p2shang/view?usp=sharing

Gambar II.4 Spreadsheet Pemantauan Penugasan

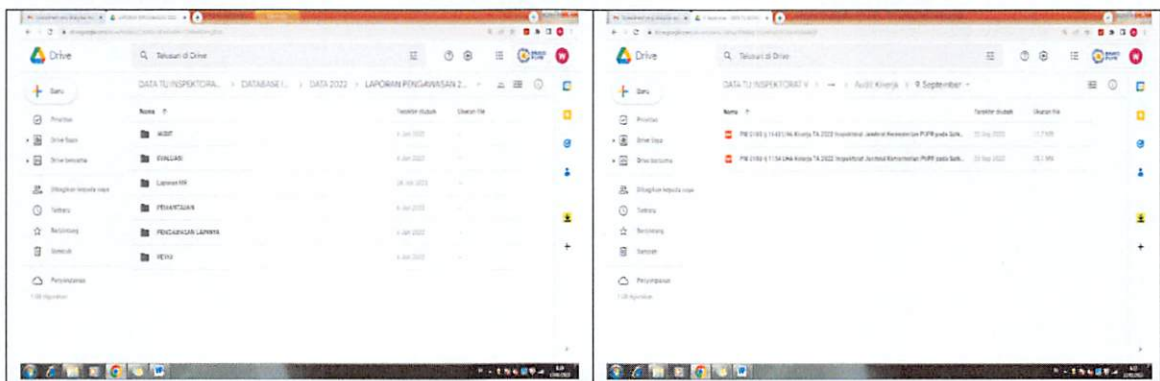
Spreadsheet ini berisikan data aktifitas penugasan AREPP, dari mulai usulan, SPT, hari penugasan, hingga proses persetujuan laporan, pengiriman laporan dan dokumentasi pelaporan.

No	Pengirim Surat	Nomor Agenda	Pengirim	Substansi	No. Tgl. Hal	Tanggal Terima	Diajukan	Kepada	Diproses	Isi	Risiko BPJIK Wilayah	Usulan
1	an Masyarakat Kalimantan Tengah-Brian Utama		Masyarakat (personal tokoh masyarakat katg)	Direktorat Pengadaan Dirjen Bina Konstruksi Tambusan: 1. Menten PUPR 2. Inspektoral Jendral PUPR 3. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 4. Polisi Daerah Kalimantan Tengah	No. - Tanggal: - Hal -	4 Januari 2022	Inspektur Jendral	Ses Ijèn Inspektur I Inspektur II Inspektur V	Diketahui/Sebagai informasi Mempelajari dan menyampaikan saran Monitoring Perkembangannya		BPJIK Wilayah Kalimantan Tengah	BM
2	Media Online Metro Kallang, Jurnal89, Liputan SBM dan Expo55	LSM		Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi 3. Inspektoral Jendral Kamertanan PUPR	No. - Tanggal: 30 Desember 2021 Hal -	7 Januari 2022	Inspektur Jendral	Ses Ijèn Inspektur II Inspektur V	Diketahui/Sebagai informasi Mempelajari dan menyampaikan saran Monitoring Perkembangannya		BPJIK Wilayah Kalimantan Tengah	BM
3	Surat Kabar Harapan Rakyat	LSM		Kementerian PUPR	No. - Edisi 733 Tahun XIV Tanggal: 17 Jan 2022 Hal. Perusahaan sudah di blacklist Pemenang di BPJIK Aceh Dirjen Bina Konstruksi	18 Januari 2022	Inspektur Jendral	Ses Ijèn INSPEKTUR I INSPEKTUR II INSPEKTUR III INSPEKTUR IV INSPEKTUR V INSPEKTUR VI	Diketahui/Sebagai informasi Mempelajari dan menyampaikan saran Membuat jawaban/tanggapan		BPJIK Wilayah Aceh	SDA
4	DPP GEBRAKK -	LSM		1. Menten PUPR	No. 01:GBKKS/KG2022	31 Januari 2022	Inspektur Jendral	Ses Ijèn	Diketahui/Sebagai informasi			BM



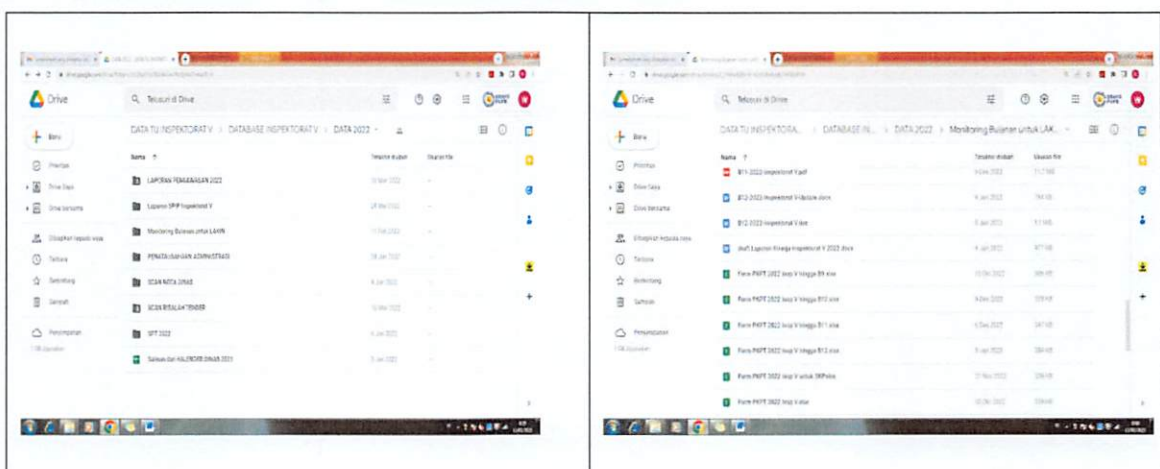
Gambar II.5 Spreadsheet Pemantauan Pengaduan

Spreadsheet ini berisikan data aktivitas tindak lanjut terhadap pengaduan, mulai surat pengaduan masuk ke Inspektorat V, analisis pengaduan oleh tim, usulan Penelitian Awal, rekomendasi Penelitian Awal hingga proses ADTT jika diperlukan.



Gambar II.6 Gdrive Dokumentasi Laporan

Gdrive ini merupakan tempat penyimpanan arsip digital data dokumentasi laporan yang telah selesai, sesuai dengan jenis penugasan dan tanggung jawab masing-masing Koordinator Bidang serta waktu/bulan selesainya laporan.



Gambar II.7 Gdrive Monitoring Laporan Kinerja



Gdrive ini berisikan arsip digital data serta laporan untuk *monitoring* dan evaluasi setiap bulan, serta data lain yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat V.

Nama	CUTI TAHUNAN KE.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Muhammad Rizal ST Sp 1 QIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ir. Danto MT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmi Yuliah ST MT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firman Supharto ST Sp 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Herman SE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Satriadama Eliska SE MM QIA CFA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hemasari SE MBA CRNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hari Al Rayid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diana Hendra Cista SE M SE M Sc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naili Afriz ST MT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ir. Sasmito Wiharsono ST MA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekay Roslan ST MT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dumans BR Smurat SE M Ak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indah Triana Rostari SE Ak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lona Prameswari S I Kom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
David Ferdianandus M ST SE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Astya SE M Ak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Widnu Immanuel P Marbut ST MT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Osni Rindu Lubis SE M Ak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Osby Handayani SE M Sc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Endang Sutarna SAP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dheny Dyanh Pradista SE Ak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Gambar II.8 Spreadsheet Pemantauan Cuti

Spreadsheet ini berisikan pemantauan cuti untuk setiap pegawai untuk setiap bulannya.

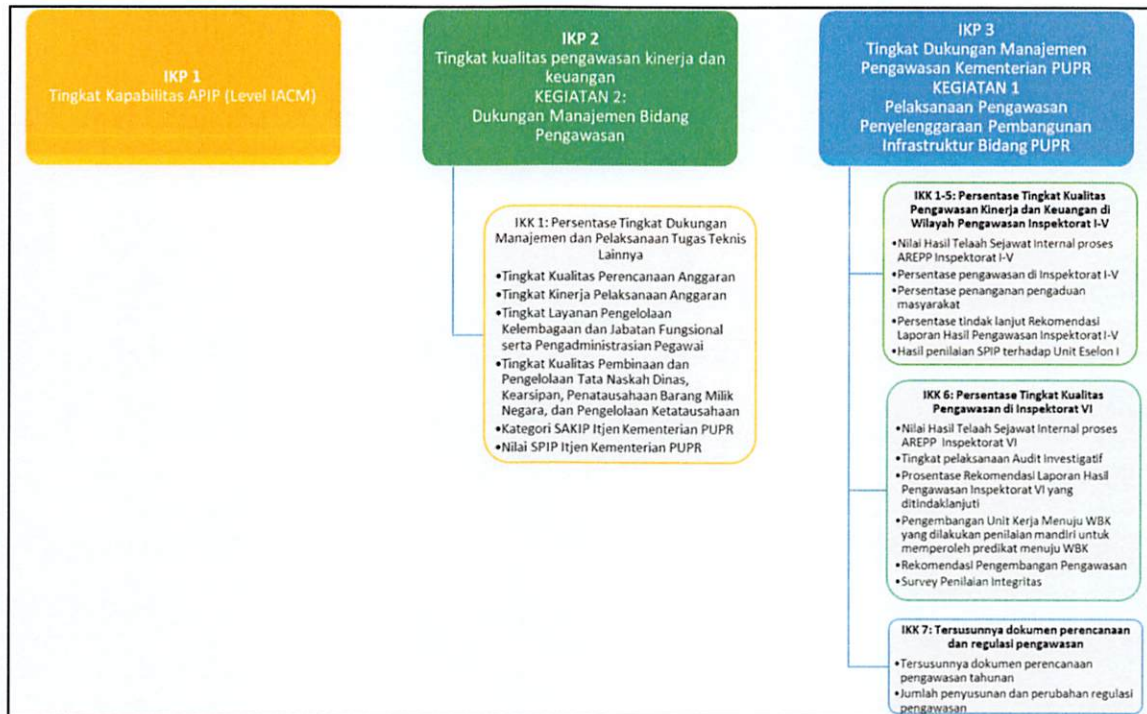
2.4. Peta Kinerja Inspektorat V

Dalam perencanaan kinerja yang bersifat *top down* diperlukan peta/pohon kinerja yang berasal dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program dari Unit Organisasi Inspektorat Jenderal seperti yang terlihat pada bagan berikut:



Gambar II.9 Indikator Kinerja Program Unor Inspektorat Jenderal

Dari Indikator Kinerja program di atas, akan diuraikan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal berupa Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Dalam hal ini, Inspektorat V memiliki Sasaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan di Bidang SIBB dan *Mandatory* dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V:



Gambar II.10 Cascading Indikator Kinerja Program menjadi Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja Inspektorat V yang telah ditandatangani oleh Inspektur V dalam dokumen Perjanjian Kinerja, maka sasaran kinerja tersebut perlu diturunkan pada seluruh pegawai/individu di Inspektorat V. Dalam melaksanakan penjenjangan kinerja (*cascading*) ini, maka perlu diketahui hubungan/keterkaitan antara sasaran kegiatan Inspektorat V dengan Rincian *Output* (RO) tugas para pegawai/individu, sesuai dengan fungsinya, baik sebagai Pejabat Fungsional Auditor maupun Sub Bagian Penatausahaan, yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar II.11 Keterkaitan dan Cascading Indikator Kinerja Kegiatan dengan Rincian Output (RO) pada Inspektorat V

Untuk Sasaran Penerapan Manajemen Risiko dan SPIP di Inspektorat V pada Tahun 2022 ini belum menjadi *output* yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Inspektorat V, dan masih merupakan *output* dari Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Sasaran Kinerja Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V merupakan fungsi dan tugas Inspektorat V yang diukur dengan Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yang terdiri dari 5 (lima) indikator, yang sumbernya diolah dari rincian *output* berupa Laporan Hasil Kegiatan AREPP (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya).

Pelaksanaan kegiatan AREPP akan ditugaskan kepada pejabat fungsional auditor atau pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas AREPP yang telah memenuhi ketentuan, dengan sebaran target Rincian *Output* (RO) disesuaikan dengan Rencana Penugasan yang terdapat pada Lampiran Pedoman Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT 2022. Berikut ini adalah tampilan target Rincian *Output* berdasarkan lampiran PKPT 2022:

Jenjang JF Auditor	Audit			Reviu			Evaluasi			Pemantauan			Pemantauan Lainnya		
	Laporan (Nama)	Laporan (To be named)	Jumlah Target Laporan	Laporan (Nama)	Laporan (To be named)	Jumlah Target Laporan	Laporan (Nama)	Laporan (To be named)	Jumlah Target Laporan	Laporan (Nama)	Laporan (To be named)	Jumlah Target Laporan	Laporan (Nama)	Laporan (To be named)	Jumlah Target Laporan
Auditor Madya															
Ir Dianto, MF	11	2	13	10	-	10	4	1	5	1	-	1	-	-	2
Firman Sugiharto, ST, Sp 1	11	2	13	10	-	10	4	1	5	1	-	1	-	-	2
Anf Budiyono, ST, M Eng, CIA	13	2	15	8	-	8	4	1	5	1	-	1	-	-	2
Herman, SE	12	2	14	8	-	8	5	1	6	1	-	1	-	-	2
Satnadarma Eliska, SE, MM, CIA, CFA	6	2	8	23	-	23	9	1	10	1	-	1	-	-	2
Hermawan, SE, MBA, CRMO	12	2	14	8	-	8	5	1	6	1	-	1	-	-	2
Auditor Muda															
Indah Triana Ristari, SE, Ak	11	2	13	10	-	10	4	1	5	1	-	1	-	-	2
Rahmi Yulash, ST, MT	12	2	14	8	-	8	5	1	6	1	-	1	-	-	2
Liona Pramesbani, S.I, Kom	12	2	14	8	-	8	5	1	6	1	-	1	-	-	2
Dian Rindu Lubis, SE, MAk	12	2	14	8	-	8	5	1	6	1	-	1	-	-	2
Na'il Alifah, ST, MT	12	2	14	8	-	8	8	1	9	1	-	1	-	-	2
Dimas Hendra Cipta, SE, M SE, M Sc	12	2	14	8	-	8	5	1	6	1	-	1	-	-	2
Ir Sasmito Wiharsono, ST, MA	12	2	14	8	-	8	5	1	6	1	-	1	-	-	2
Aditya, SE, MAk	6	2	8	8	-	8	7	1	8	1	-	1	-	-	2

Gambar II.12 Tampilan *Cascading Rincian Output* pada Inspektorat V



Tujuan dari cascading adalah agar *output* dapat dibagi sesuai tugas dan fungsi masing-masing Pejabat Fungsional Auditor. Dalam penentuan target ini, Pejabat Fungsional Auditor dapat ditugaskan sesuai dengan jenjang jabatannya atau naik/turun setingkat dari jenjang jabatannya sesuai dengan ketentuan pedoman teknis Jabatan Fungsional Auditor.



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat V digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Pada Tahun 2022 ini, pengelolaan SDM di Inspektorat V telah menghasilkan beberapa capaian, baik berupa pemberian penghargaan (*rewards*) maupun penegakan disiplin berupa hukuman (*punishment*).

Rewards kepada pegawai antara lain berupa kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan melalui sertifikasi profesi auditor dan manajemen risiko. Selain itu, penghargaan lain berupa kenaikan jenjang jabatan kepada 3 (tiga) orang pegawai, dan kenaikan golongan kepada 7 (tujuh) orang pegawai. Kenaikan jenjang jabatan dan golongan tersebut tentunya akan menambah penghasilan bagi pegawai tersebut.

Penegakan disiplin dilaksanakan antara lain dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat dan atau tidak masuk tanpa keterangan. Selama tahun 2022 ini telah dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebanyak Rp43.936.483,00.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/IJ/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 1.1/KPTS/IJ/2022 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penempatan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan data Daftar Urut Kepangkatan Bulan Desember 2022 maka pegawai yang ditempatkan di Inspektorat V sebanyak 39 orang pegawai terdiri dari 35 orang PNS, 4 orang CPNS dan 2 orang Non PNS, dengan penjelasan sebagai berikut:

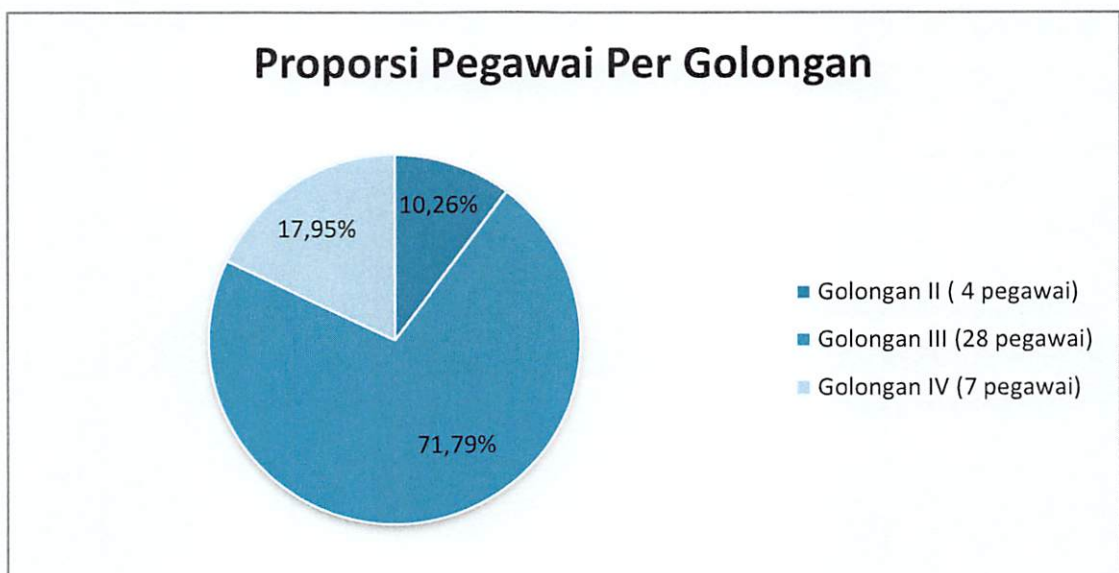


- a. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat V pada bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
A	Pegawai Negeri Sipil					
a.	Inspektur V	1	0	0	0	1
b.	Kasubbag Tata Usaha Inspektorat IV	0	1	0	0	1
c.	Auditor Madya	6	0	0	0	6
d.	Auditor Muda	0	6	0	0	6
e.	Auditor Pertama	0	11	0	0	11
f.	Auditor Penyelia	0	1	0	0	1
f.	Auditor Terampil	0	0	3	0	3
g.	Analisis Monev dan Pelaporan	0	3	0	0	3
h.	Analisis SDM Aparatur	0	1	0	0	1
j.	Pengadministrasi Umum	0	1	0	0	1
k.	CPNS	0	4	0	0	4
l.	Karyasiswa	0	0	1	0	1
	Jumlah PNS	7	28	4	0	39
B	Non Pegawai Negeri Sipil					
a.	Pramubakti					1
b.	Pengemudi					1
	Jumlah Non PNS					2
	Total Pegawai Inspektorat IV					41

Dari hasil pendataan pegawai tersebut maka dapat diuraikan proporsi pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut:



Grafik III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tampak bahwa sebagian besar pegawai saat ini berada pada golongan III. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada golongan dengan pengalaman kerja baru hingga menengah, dan menduduki jenjang jabatan fungsional menengah (Ahli Pertama hingga Ahli Muda).

- b. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat V Tahun 2022 berdasarkan jabatan dan *gender* adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.

Tabel III. 2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	L	P
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	1	0
2	Jabatan Administrasi Pengawas	1	0	1
3	Auditor Madya	6	4	2
4	Auditor Muda	6	2	4
5	Auditor Pertama	11	3	8
6	Auditor Penyelia	1	1	0
7	Auditor Terampil	3	1	2
8	Analisis Monev dan Pelaporan	3	3	0
9	Analisis SDM Aparatur	1	0	1
10	Pengadministrasi Umum	1	1	0
11	CPNS	4	0	4
12	Karyasiswa	1	0	1
13	Non PNS	2	2	0
Jumlah		41	18	23

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki

P = Pegawai Perempuan

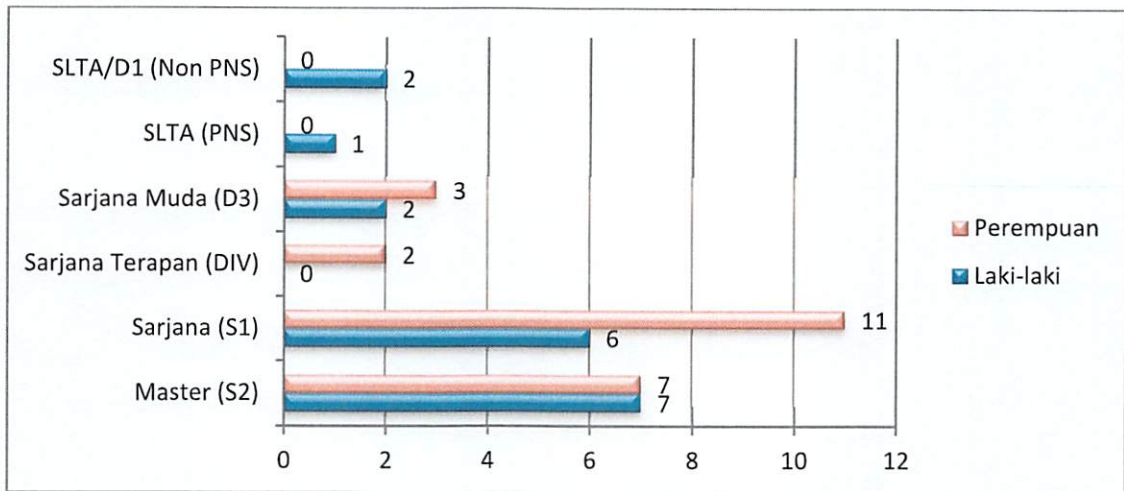
Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah pegawai dengan *gender* laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Namun untuk jumlah auditor masih lebih banyak perempuan, yaitu 16 pegawai perempuan dibandingkan 10 auditor pria. Hal ini tidak terlalu berpengaruh pada strategi penugasan auditor.

- c. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat V Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.

Tabel III. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

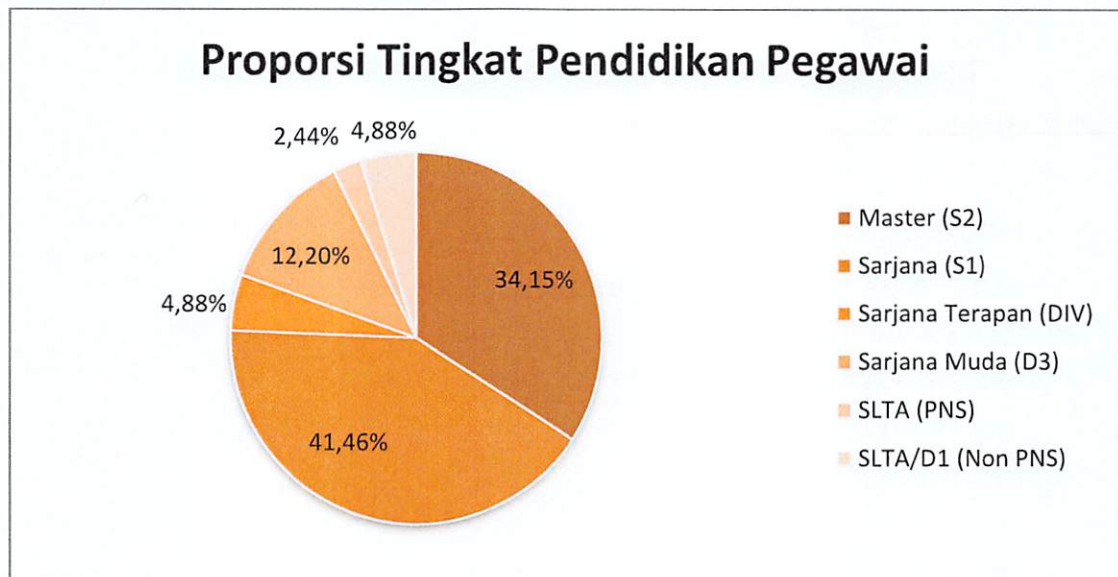
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
A	Pegawai Negeri Sipil	39	16	23
1	Master (S2)	14	7	7
2	Sarjana (S1)	17	6	11
3	Sarjana Terapan (DIV)	2	0	2
4	Sarjana Muda (D3)	5	2	3
5	SLTA	1	1	0
B	Non Pegawai Negeri Sipil	2	2	0
1	SLTA/D1	2	2	0
Jumlah		41	18	23

Berdasarkan data pegawai tersebut tampak bahwa kualifikasi pendidikan cukup baik karena sebagian besar pegawai telah mengenyam pendidikan minimal Diploma III/S1.



Grafik III.2 Proporsi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender

Pada grafik tersebut terlihat bahwa kebijakan respon *gender* pun telah dilaksanakan antara lain dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan tingkat pendidikan.



Grafik III.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan data pegawai tersebut tampak bahwa kualifikasi pendidikan cukup baik karena sebagian besar pegawai telah mengenyam pendidikan minimal Diploma III/S1. Strategi peningkatan kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan Unit Kerja dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pegawai sehingga menunjang karir pegawai tersebut.

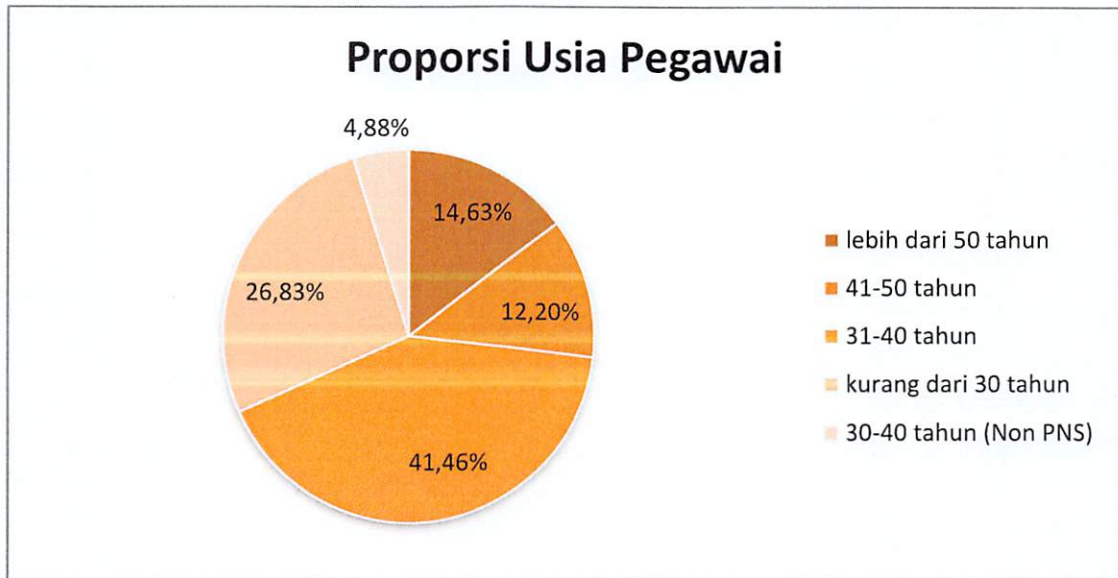
- d. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat V Tahun 2021 berdasarkan usia adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.4.

Tabel III. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	39	16	23
1	lebih dari 50 tahun	6	6	0
2	41-50 tahun	5	4	1
3	31-40 tahun	17	4	13
4	kurang dari 30 tahun	11	2	9
B	Non Pegawai Negeri Sipil	2	2	0

1	30-40 tahun	2	2	0
	Jumlah	41	18	23

Dari tabel di atas nampak bahwa sebagian besar pegawai adalah berusia 40 tahun ke bawah dengan sebaran *gender* lebih banyak perempuan.



Grafik III.3 Proporsi Pegawai Berdasarkan Usia

Tampak bahwa proporsi pegawai di bawah 40 tahun mencapai 68,29%. Hal ini menjadi keuntungan dan modal sumber daya terutama dalam penerapan teknologi informasi karena generasi di bawah 40 tahun tersebut cenderung lebih mudah beradaptasi dengan penerapan teknologi informasi.

3.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu sumber daya yang menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hingga Desember 2022, Inspektorat V mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp1.805.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Rupiah) untuk melaksanakan Program Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V.

Data Anggaran pada Inspektorat V TA. 2022 dan perubahannya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.5.

Tabel III. 5 Anggaran Inspektorat V TA. 2022

KODE	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Pagu (Rp.ribu)	Pagu setelah revisi anggaran I (Rp ribu)	Pagu setelah revisi anggaran II (Rp ribu)	Pagu setelah revisi anggaran III (Rp ribu)
2392.EB D.005.0 51.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	2.150.000	1.800.000	1.696.000	964.000
2392.EB D.005.0 52.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	900.000	510.000	25.000	1.000
2392.EB D.005.0 53.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	600.000	600.000	20.000	1.000

KODE	Kegiatan/KRO/RO/ Paket	Pagu (Rp.ribu)	Pagu setelah revisi anggaran I (Rp ribu)	Pagu setelah revisi anggaran II (Rp ribu)	Pagu setelah revisi anggaran III (Rp ribu)
2392.EB D.005.0 54.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	600.000	1.040.000	474.000	437.000
2392.EB D.005.0 55.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	600.000	600.000	60.000	62.000
2392EB D.006.0 51.A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	1.150.000	1.150.000	365.000	340.000
	TOTAL	6.000.000	5.700.000	2.640.000	1.805.000

Mekanisme perubahan anggaran di lingkungan Inspektorat V masih menggunakan metode *top down* (ditentukan dari perubahan Pagu DIPA Inspektorat Jenderal), karena Inspektorat V masih berupa Unit Kerja yang pengelolaan anggaran masih terpusat pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, sehingga Unit Kerja Inspektorat V tidak dapat sewaktu-waktu melakukan usulan perubahan anggaran.



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Sasaran Kegiatan 1.5, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.5 dengan pelaksana Inspektorat V yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V” diukur dengan menggunakan indikator dan capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV. 1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat V Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2022	REALISASI				
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2022
	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V		78%	29%	35%	44%	88%	87%
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	25%	90	0	0	0	94,67	94,67
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V	25%	80%	19%	33,2%	62%	110,56%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	85%	75%	79,59%	74,29%	83,33%	83,33%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	15%	55%	0%	0%	37%	45,99%	60,59%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	70%	55,43%	73,08%	79,70%	91,50%	86,32%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil penilaian BPKP (quality assurance)	40%	90%	91,54%	91,54%	91,54%	91,54%	91,54%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,136	3,136	3,136	3,136	3,136
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	45%	0%	50%	68,75%	87,5%	87,5%

Secara umum realisasi IKK 1.5 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V telah mencapai target tahun 2022, namun terdapat catatan untuk perhitungan Indikator Kinerja kegiatan ini, di antaranya:

- 1) Nilai Hasil telaah sejawat untuk Tahun 2022 adalah 94,67. Nilai hasil telaah sejawat ini berada pada rentang 90-100 yang berarti “Sangat Baik”.



- 2) Persentase pengawasan di Inspektorat V 100% dari target tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa rincian *output* telah melebihi target pada Pedoman Kebijakan Pengawasan dan PKPT 2022.
- 3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat 83,33% telah ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas pengaduan ini terdiri atas jawaban normatif kepada pihak pengadu, tindak lanjut berupa penelitian awal, dan tindak lanjut pengaduan berupa Audit Atas Tujuan Tertentu (ADTT). Pengaduan yang belum ditindaklanjuti antara lain disebabkan karena data/bukti dukung yang kurang lengkap, pengaduan yang masih dalam proses tender, pengaduan yang tidak tepat ditujukan kepada Inspektorat V.
- 4) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan internal dan eksternal dengan persentase rata-rata 60,59% telah melebihi target tahunan. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan internal Unit Organisasi SIBB dan Binkon sudah ditindaklanjuti rekomendasi sebanyak 488 rekomendasi dari 1061 rekomendasi, atau sebanyak 45,99% rekomendasi sudah tuntas. Realisasi ini belum mencapai target Tahun 2022 yaitu 55% rekomendasi telah tuntas. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya koordinasi dengan pihak Auditi sehingga pihak Auditi belum aktif untuk menyelesaikan rekomendasi dari Laporan Hasil Pengawasan. Unit organisasi dengan tindak lanjut rekomendasi yang masih berada di bawah target tahunan 55% rekomendasi ditindaklanjuti adalah Unor BPSDM (49,57% rekomendasi tuntas, dengan total sisa 59 rekomendasi), Unor Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (43% rekomendasi tuntas dengan total sisa 472 rekomendasi), dan Unor Sekretariat Jenderal (53,75% rekomendasi tuntas dengan total sisa 37 rekomendasi). Sedangkan untuk tindak lanjut pengawasan eksternal, rekomendasi tuntas untuk LHP BPK sebanyak 600 rekomendasi dari 798 rekomendasi atau sebesar 75,19%. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen dengan hasil penilaian BPKP masih menggunakan nilai tahun 2019 karena hingga tahun 2022 proses penilaian oleh BPKP masih belum selesai.
- 5) Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen dengan hasil penilaian BPKP masih menggunakan nilai tahun 2019 karena hingga tahun 2022 proses penilaian oleh BPKP masih belum selesai.
- 6) Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina masih menggunakan nilai tahun sebelumnya yaitu 3,136 disebabkan Tim BPKP masih melaksanakan tahapan penilaian. Walaupun demikian, pada tahun 2022 ini Tim Evaluasi dari Inspektorat Jenderal telah menyelesaikan Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi untuk Tingkat Kementerian PUPR Tahun 2022 dengan tingkat maturitas mencapai nilai akhir 4 (empat) pada tingkat "terkelola dan terukur". Untuk Unor Setjen, Itjen, BPIW dan BPSDM juga telah dilakukan Evaluasi Maturitas SPIP, namun untuk nilai akhir tingkat maturitas, Tim Evaluasi Maturitas SPIP hanya menggunakan nilai level/tingkat maturitas gabungan Tingkat Kementerian.
- 7) Persentase Penerapan Manajemen Risiko menggunakan sumber data Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan untuk Unor Sekretariat Jenderal, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, Itjen dan BPIW. Sesuai Pedoman Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko, maka perhitungan persentase menggunakan jumlah satuan kerja pada unit organisasi yang telah dievaluasi dan telah membentuk Tim Pengelola Risiko TPR-2. Perhitungan persentase menggunakan rata-rata seluruh unor tersebut sehingga didapatkan nilai 87,5% telah membentuk dan menerapkan pedoman manajemen risiko.

Dari data di atas dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas pelaporan AREPP untuk Inspektorat V sudah tercapai, terlihat dari indikator persentase pengawasan yang telah tercapai serta nilai kualitas pelaporan melalui hasil telaah sejawat yang juga telah memenuhi target di tahun 2022. Nilai hasil telaah sejawat dengan nilai 94,67 atau simpulan "Sangat Baik" menunjukkan pula bahwa standar pelaksanaan AREPP di Inspektorat V telah memenuhi Standar Audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI);



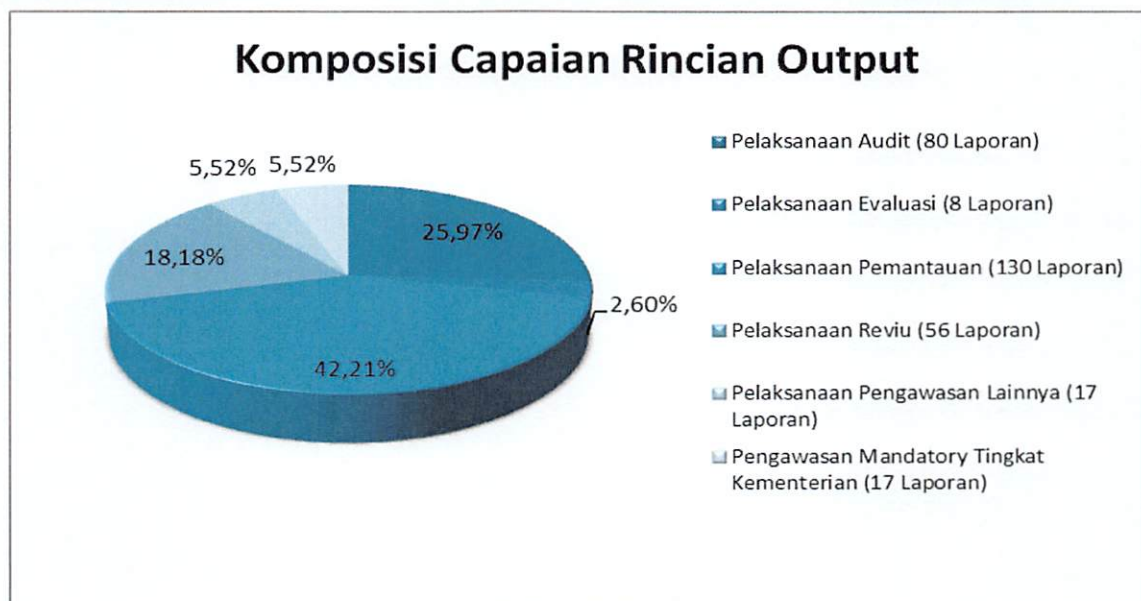
- 2) Respon terhadap pengaduan masih dapat ditingkatkan, terutama pada triwulan I dan triwulan II dikarenakan siklus lelang/tender yang berjalan hingga triwulan I akan meningkatkan risiko pengaduan dari peserta maupun pihak lain pada periode ini;
- 3) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dapat mulai dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak Auditi dari awal tahun/Semester I;
- 4) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk pihak Auditi dapat terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan kegiatan pengawasan lainnya di triwulan I dan II, sehingga saat dilakukan evaluasi untuk tahun anggaran berjalan, pihak Auditi akan mendapatkan manfaat dengan mendapatkan nilai Evaluasi SPIP yang baik pula.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2022 di atas merupakan hasil dari capaian Rincian *Output* (RO) Tahun 2022. Berikut ini adalah capaian Rincian *Output* (RO):

Tabel IV. 2 Capaian *Output* Program dan Capaian *Output* Kegiatan Tahun 2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Awal	Target Jakwas	Realisasi 2022	Satuan	% Terhadap Target
	Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi; Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian	138	161	308	Laporan	100%
051.A	Pelaksanaan Audit di Inspektorat V	28	65	80	Laporan	123,08%
052.A	Pelaksanaan Evaluasi di Inspektorat V	40	22	8	Laporan	36,36%
053.A	Pelaksanaan Pemantauan di Inspektorat V	9	5	130	Laporan	2600%
054.A	Pelaksanaan Reviu di Inspektorat V	44	42	56	Laporan	133,33%
055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat V	14	10	17	Laporan	170%
006.05 1A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	3	17	17	Laporan	100%

Dari tabel di atas maka tampak bahwa pencapaian rincian *output* di tahun 2022 sudah melebihi target sebesar 100% dari target 2022, dengan komposisi sebagai berikut:



Grafik IV.1 Komposisi Capaian Rincian *Output*

Dari data di atas maka dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Aktivitas pengawasan internal berupa Audit di Inspektorat V telah mencapai target dengan 80 LHP (123,08% dari target tahunan). Proporsi rincian *output* berupa audit terhadap keseluruhan Laporan AREPP sebesar 44,94%. Hal ini menunjukkan penugasan audit merupakan aktifitas pengendalian internal yang masih dominan dilaksanakan oleh Inspektorat V. Audit yang dilaksanakan adalah Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT), dengan rincian 67 Laporan, dan Audit Kinerja TA 2022 sebanyak 13 Laporan.
- 2) Aktivitas pengawasan internal berupa evaluasi oleh Inspektorat V masih belum mencapai target tahunan, yaitu sebanyak 8 Laporan (36,36% dari target tahunan). Hal ini terjadi karena rencana Evaluasi Tematik dengan berkoordinasi dengan Inspektorat I-IV belum dapat dilaksanakan. Selain itu, kegiatan evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Risiko tidak memerlukan evaluasi interim/per semester, Proporsi capaian rincian *output* evaluasi adalah 4,49%. Evaluasi yang telah dilaksanakan adalah Evaluasi SAKIP 4 Laporan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko sebanyak 4 Laporan.
- 3) Aktivitas pengawasan internal berupa Pemantauan Tindak Lanjut tidak dapat dicapai karena belum adanya kesepakatan dengan Bagian Evaluasi Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Bagian Perencanaan Pemrograman dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan hasil kerja/pelaporan kegiatan Pemantauan. Pemantauan Tindak Lanjut di Inspektorat V sendiri tetap dilaksanakan secara harian jika ada tindak lanjut yang harus diselesaikan oleh Tim, dan secara berkala/bulanan dilaksanakan melalui Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Bulanan (Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan).
- 4) Aktivitas pengawasan internal Reviu oleh Inspektorat V sudah mencapai target dengan 56 Laporan (133,33% dari target tahunan). Proporsi rincian *output* Reviu terhadap keseluruhan penugasan AREPP sebesar 31,46%. Reviu yang dilaksanakan berupa Reviu Revisi Anggaran 18 Laporan, Reviu Laporan Keuangan 14 Laporan, Reviu RKA KL 9 Laporan, Reviu RKBMN 11 Laporan, Reviu Administrasi Lainnya 4 Laporan.
- 5) Aktivitas Pengawasan Lainnya oleh Inspektorat V sudah mencapai target dengan 17 Laporan (170% dari target tahunan). Proporsi Pengawasan Lainnya 9,55% dari keseluruhan Laporan AREPP. Kegiatan pengawasan lainnya berupa pendampingan sebanyak 3 (tiga) LHP dan 14 (empat belas) Laporan Pengawasan Lainnya yang berupa laporan kegiatan sebagai narasumber, undangan *workshop*, undangan *FGD*, dan undangan koordinasi.
- 6) Pengawasan *Mandatory* Tingkat Kementerian, sudah mencapai target dengan 17 Laporan (100% dari target tahunan), sehingga proporsi Pengawasan *Mandatory* Tingkat Kementerian 5,52% dari keseluruhan Laporan AREPP. Pengawasan *Mandatory* tingkat Kementerian yang telah dilaksanakan berupa Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKBMN, Reviu Penyerapan Anggaran Tingkat Kementerian, dan Evaluasi Maturitas SPIP.





Gambar IV. 1 Kegiatan Reviu RKBMN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024



Gambar IV. 2 Peserta Kegiatan Reviu RKBMN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Kinerja organisasi perlu dilakukan analisis perbandingan untuk dilakukan evaluasi tiap tahunnya, baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sub bab ini membahas hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sebagaimana dijelaskan pada Bab. II, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, sehingga terdapat perubahan pada cara ukur terhadap capaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah capaian kinerja Inspektorat V tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021:

Tabel IV. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan / Cara Pengukuran	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR				
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	74%	78%	78%	87%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90	94,85	90	94,67
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V	75%	100%	80%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	80%	80%	85%	83,33%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	50%	29,91%	55%	60,59%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	61,82%	55,43%	70%	91,50%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>)	87,5%	91,54%	90%	91,54%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3,14	3	3,136
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	25%	0%	45%	87,5%

Dari data tahun 2021 dan 2022 di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Angka pencapaian indikator kegiatan di Tahun 2022 meningkat dibandingkan dari tahun 2021. Kebijakan dan strategi pencapaian kegiatan dan *output* sangat efektif dalam mencapai dan meningkatkan realisasi kinerja. Peningkatan dari 78% (2021) menjadi 110% (2022), dengan menggunakan formulasi efektivitas sebagai berikut:
Efektivitas = Capaian Kinerja Tahun 2022/Capaian Kinerja Tahun 2021
sehingga dapat diukur efektivitas meningkat 1,41 x dari tahun sebelumnya.
- 2) Kualitas hasil pelaksanaan dan pelaporan AREPP dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari Nilai Hasil Telaah Sejawat yang mencapai nilai di atas 90 selama tahun 2021 dan 2022.
- 3) Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dalam menangani pengaduan sudah baik namun masih dapat ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.
- 4) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan pada tahun 2022 meningkat cukup signifikan, dari 29,91% (Tahun 2021) menjadi 49,55% (Tahun 2022). Hal ini menunjukkan terjadi koordinasi yang baik antara Inspektorat V dengan pihak Auditi, sehingga rekomendasi hasil pengawasan dapat dilaksanakan dan dituntaskan.
- 5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I yang dibina oleh Inspektorat V mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini diakibatkan terutama karena koordinasi antar Inspektorat V dengan unit organisasi SIBB dan Bina Konstruksi sehingga unit organisasi dapat meningkatkan *awareness* terhadap penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Manajemen Risiko di lingkungan Unit Organisasi. Inspektorat V dalam hal ini juga telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan dalam penerapan dan penyusunan dokumen SPIP dan Manajemen Risiko melalui proses penilaian/evaluasi.

4.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

Capaian sasaran program tahun 2022 menunjukkan kinerja yang baik dan telah memenuhi target Renstra tahun 2022. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target antara lain Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V.

Tabel IV. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat V Tahun 2022 dengan Target Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2024
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR			
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78%	87%	87%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%)	90	94,67	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat V (25%)	80%	100%	90%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85%	83,33%	95%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%)	55%	60,59%	65%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	70%	91,50%	92%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2024
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality assurance</i>) (40%)	90%	91,54%	95%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	3	3,136	4
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (30%)	45%	87,5%	85%

Dari tabel di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Proses pelaksanaan penugasan AREPP secara kualitas sudah baik dan berhasil menjaga mutu yang diinginkan setiap tahunnya, terlihat dari nilai telaah sejawat yang berada di atas target, dan secara kuantitas telah melebihi target. Namun untuk mempertahankan hingga tahun 2024 diperlukan strategi agar antara kualitas dan kuantitas tetap dapat terus sesuai target yang diinginkan.
- 2) Untuk Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat masih memerlukan strategi dan kebijakan yang mempercepat pelaksanaan respon atas pengaduan, agar target 95% pengaduan di tahun 2024 dapat terlaksana.
- 3) Untuk Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dapat terus ditingkatkan hingga tahun 2024 dengan cara koordinasi dengan pihak auditi untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi, baik TL LHP yang sudah lama maupun yang baru.
- 4) Penerapan SPIP dan MR masih memerlukan peningkatan terutama untuk Penerapan SPIP harus mencapai level 4, walaupun evaluasi internal Kementerian PUPR yang dilaksanakan Tim Evaluasi Itjen sudah mencapai level 4. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi penerapan SPIP pada unit organisasi agar lebih matang/*mature* serta Tim Evaluasi harus tetap memantau tahapan penilaian oleh Tim BPKP.

4.3. Realisasi Anggaran

4.3.1. Realisasi Anggaran TA 2022

Realisasi anggaran Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.

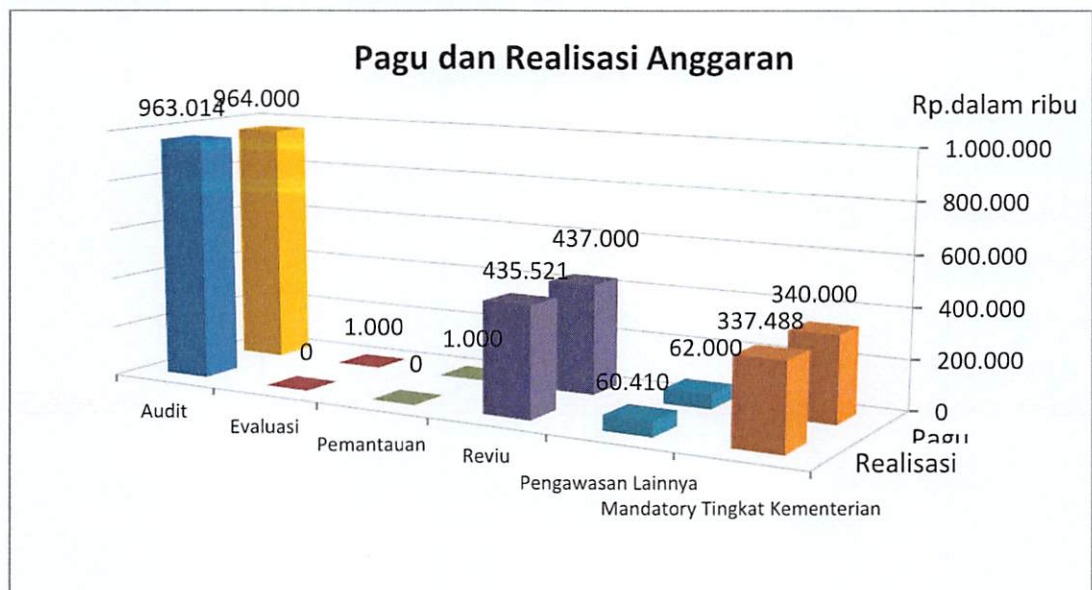
Tabel IV.5 Realisasi Anggaran Tahun 2022

KODE	Kegiatan/KRO/R O/Paket	Pagu (Rp.ribu)	Pagu setelah revisi I (Rp.ribu)	Pagu setelah revisi II (Rp.ribu)	Pagu setelah revisi III (Rp.ribu)	Realisasi (Rp.ribu)	% terhadap pagu setelah revisi
2392.EBD.0 05.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	2.150.000	1.800.000	1.696.000	964.000	963.014	99,9
2392.EBD.0 05.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	900.000	510.000	25.000	1.000	0	0
2392.EBD.0 05.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	600.000	600.000	20.000	1.000	0	0
2392.EBD.0 05.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	600.000	1.040.000	474.000	437.000	435.521	99,66
2392.EBD.0 05.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina	600.000	600.000	60.000	62.000	60.410	97,44



KODE	Kegiatan/KRO/R O/Paket	Pagu (Rp.ribu)	Pagu setelah revisi I (Rp.ribu)	Pagu setelah revisi II (Rp.ribu)	Pagu setelah revisi III (Rp.ribu)	Realisasi (Rp.ribu)	% terhadap pagu setelah revisi
	Konstruksi						
2392EBD.00 6.051.A	Pengawasan Mandatory Tingkat Kementerian	1.150.000	1.150.000	365.000	340.000	337.448	99,26
	TOTAL	6.000.000	5.700.000	2.640.000	1.805.000	1.796.433	99,53

Realisasi anggaran per rincian *output* dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Grafik IV. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d. 31 Desember 2022

Anggaran Inspektorat V pada tahun 2022 yang terealisasi adalah sebesar 99,53% dari pagu setelah Revisi Anggaran terakhir di Bulan Desember 2022, dengan beberapa hasil analisis sebagai berikut:

- Kegiatan Audit sudah optimal dalam menggunakan sumber daya anggaran;
- Kegiatan Evaluasi tidak menggunakan sumber daya anggaran karena pelaksanaan evaluasi dilaksanakan di lingkungan kantor, sehingga merupakan efisiensi bagi Unit Kerja;
- Kegiatan Pemantauan tidak menggunakan sumber daya anggaran karena kegiatan dilaksanakan di lingkungan kantor, sehingga merupakan efisiensi bagi Unit Kerja;
- Kegiatan Reviu sudah optimal dalam menggunakan sumber daya anggaran;
- Kegiatan Pengawasan Lainnya sudah optimal dalam menggunakan sumber daya anggaran;
- Kegiatan *Mandatory* sudah optimal dalam menggunakan sumber daya anggaran;
- Jika dibandingkan antara realisasi akhir anggaran Rp1.796.433.000,00 dengan rencana awal sumber daya anggaran dengan total pagu Rp6.000.000.000,00 maka Inspektorat V telah mampu melakukan penghematan/efisiensi hingga 70,06%.

4.3.2. Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2022 dengan TA 2021

Dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan anggaran, maka realisasi anggaran Tahun 2022 dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, sebagai berikut:



Kode	Kegiatan/ Suboutput/Komponen	Tahun Anggaran 2021		Tahun Anggaran 2022			
		PAGU (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Pagu (Rp.000)		Realisasi	
				%		(Rp.000)	%
2392.E BD.005 .051.A	Pelaksanaan Audit Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	861.107	617.587	71,72	964.000	963.014	99,9
2392.E BD.005 .052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	494.740	408.328	82,53	1.000	0	0
2392.E BD.005 .053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	47.319	23.809	50,32	1.000	0	0
2392.E BD.005 .054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	478.528	341.739	71,41	437.000	435.521	99,66
2392.E BD.005 .055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	258.186	144.046	55,79	62.000	60.410	97,44
2392E BD.006 .051.A	Pengawasan <i>Mandatory</i> Tingkat Kementerian	839.764	630.815	75,12	340.000	337.448	99,26
		2.979.644	2.166.324	72,70	1.805.000	1.796.433	99,53

Dari perbandingan tersebut dengan *output* 2021 dan 2022 yang sama-sama telah mencapai 100%, maka dapat dihitung dan dianalisis efisiensi/penghematan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022, yaitu didapatkan penghematan senilai Rp369.891.000,00 atau sebesar 17,07% dari tahun 2021.

Analisis terhadap penghematan di tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Reviu, dan Pendampingan yang dilaksanakan di lingkungan kantor Pusat Kementerian PUPR, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah;
- 2) Pelaksanaan alokasi waktu penugasan yang lebih efisien; dan
- 3) Kebijakan honor untuk narasumber yang lebih selektif, ditunjukkan dengan efisiensi dan penghematan anggaran pada *output* yang pada tahun sebelumnya membutuhkan banyak anggaran untuk narasumber, yaitu *output* Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya, dan Pengawasan *Mandatory*.

4.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Pencapaian kinerja di tahun 2022 tidak lepas dari *feedback* (umpan balik) yang dihasilkan dari Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat V untuk Tahun 2021. Beberapa umpan balik tersebut dijadikan bahan *input* dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja di tahun 2022.

Berikut ini adalah tindak lanjut hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya:

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan	Melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait Reviu Renstra untuk perbaikan indikator kinerja dan <i>me-monitoring</i> target jangka menengah dalam Renstra.	Unit Kerja telah berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan terkait rencana Reviu Renstra, namun hingga Desember 2022 tidak ada Reviu Renstra untuk Unit Organisasi Inspektorat Jenderal.

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Memanfaatkan target kinerja dalam Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.	Target kinerja telah dipantau oleh Inspektur V secara <i>real time</i> melalui <i>spreadsheet</i> pemantauan penugasan, sehingga setiap pengarahan dan pengelolaan organisasi telah mengacu pada target kinerja.
2.	Pengukuran Kinerja	Mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian SKP pegawai Inspektorat V sebagai turunan dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam PK Inspektur V yaitu Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V.	Untuk Tahun 2022, SKP dan Lampiran SKP sudah menerapkan <i>cascading</i> dari IKK. IKK membutuhkan Rincian <i>Output</i> (RO) AREPP sebagai dasar pengukuran kinerja, dan kuantitas Rincian <i>Output</i> Unit Kerja telah diturunkan kepada masing-masing pegawai/auditor sesuai jenjangnya. SKP berisikan deskripsi penugasan AREPP dan indikatornya, sedangkan Lampiran SKP Kuantitatif berisikan jumlah target <i>output</i> masing-masing pegawai.
		Melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi untuk memanfaatkan capaian kinerja sebagai dasar untuk pemberian insentif/disinsentif dan <i>reward/punishment</i> .	Hingga saat ini belum ada peraturan khusus terkait pemberian insentif dan disinsentif. Untuk pemberian <i>rewards/punishment</i> telah dilakukan pemberian penghargaan kepada para pegawai berupa kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat sebagai bagian dari apresiasi atas pencapaian kinerja yang akan berpengaruh pada insentif kenaikan penghasilan. Untuk <i>punishment</i> /pemberian hukuman berupa pemotongan tunjangan (disinsentif) atas penegakan disiplin/ketidakhadiran yang akan mempengaruhi kinerja pegawai dan Unit Kerja.
3.	Pelaporan Kinerja	Dalam penyusunan Laporan Kinerja, agar: a. Menyajikan analisis atas efisiensi sumber daya yang dikuantifikasikan; b. Menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja Inspektorat V.	Dalam Laporan Kinerja Inspektorat V Tahun 2022 ini telah diuraikan: a. Analisis atas efisiensi/penghematan sumber daya, berupa penghematan atas pagu awal dan penghematan dari tahun sebelumnya. Hal ini diuraikan pada Bab 4. b. Informasi dan analisis keuangan pada Bab 4.

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Mendokumentasikan pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja yang digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kinerja.	Laporan Kinerja tahun sebelumnya dan Hasil Rekomendasi Tim Evaluasi telah dijadikan bahan <i>input</i> dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2022, Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan, dan Laporan Kinerja Inspektorat V Tahun 2022.
4.	Evaluasi Internal	Melakukan monitoring capaian Rencana Aksi dengan menyajikan analisis simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana dalam Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan.	Di dalam Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan Tahun 2022 telah dilengkapi dengan analisis terhadap tindak lanjut rekomendasi aksi bulan sebelumnya serta pencapaian kinerja pada bulan tersebut.
		Menyajikan alternatif perbaikan atas permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan pada Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan.	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan telah menyajikan beberapa rekomendasi sebagai alternatif solusi permasalahan di bulan tersebut, serta tindak lanjut dari rekomendasi bulan sebelumnya.
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Melakukan analisis capaian kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) dan menyajikannya dalam Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan maupun Laporan Kinerja.	Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bulanan dan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah menyajikan analisis capaian kinerja <i>outcome</i> berupa analisis terhadap pencapaian Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan, serta analisis capaian <i>output</i> berupa Rincian <i>Output</i> Laporan AREPP.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat V, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada TA 2022, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Inspektorat V ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu realisasi IKK 1.5, Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V adalah 88% dari Target 78%. Hal ini juga meningkat dari tahun 2021, sehingga pelaksanaan penugasan menjadi semakin efektif.

Pencapaian kinerja yang meningkat ini disebabkan keberhasilan dalam mengelola penugasan AREPP serta peningkatan koordinasi Inspektorat V dengan pihak Unit Organisasi SIBB dan Bina Konstruksi dalam kepedulian/*awareness* penerapan SPIP dan Manajemen Risiko.

Realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar 99,53% dari alokasi yang disediakan. Penyerapan anggaran sudah optimal dan mampu melakukan penghematan mencapai 70,06% dari pagu awal sebelum revisi. Sementara dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2022 ini Inspektorat V mampu melakukan penghematan senilai Rp369.891.000,00 atau sebesar 17,07% dari tahun 2021.

Penghematan/efisiensi terjadi sebagai akibat pelaksanaan penugasan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Reviu, dan Pendampingan yang dilaksanakan di lingkungan kantor Pusat Kementerian PUPR, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah. Selain itu, kebijakan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan Kementerian Keuangan juga berakibat pada penghematan biaya-biaya, seperti biaya narasumber.

Pelaksanaan dan pelaporan *output* AREPP juga mengalami peningkatan. Pengelolaan data kinerja juga telah dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis digital dan *spreadsheet* sebagai *backup data* dalam *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penugasan.

Pencapaian pada tahun 2022 ini masih dalam jalur yang sesuai dengan target RPJMN hingga tahun 2024, sehingga pada tahun berikutnya diharapkan pelaksanaan penugasan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

5.2 Rekomendasi

Dalam mencapai dan meningkatkan kinerja di tahun 2023 diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat V tetap melakukan penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal sesuai *core values* ASN BerAkhlak. Inspektorat V juga diharapkan tetap mengembangkan sistem dan prosedur serta administrasi secara digital agar pelaksanaan penugasan dapat terlaksana dengan lebih efektif.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA
Jabatan : Inspektur V

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZAL, ST, Sp., QIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (1)	TARGET (3)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78.00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90.00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat V	80.00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	85.00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	55.00%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	90.00%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3.00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	45.00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
6,000,000,000

INSPEKTUR JENDERAL



Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, 3 JANUARI 2022
INSPEKTUR V



MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA
Jabatan : Inspektur V

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Jakarta, September 2022

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZAL, ST, Sp., QIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (1)	TARGET (2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat V	80,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	85,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	55,00%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	90,00%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	45,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

5.700.000.000

INSPEKTUR JENDERAL



Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, SEPTEMBER 2022
INSPEKTUR V



MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

Matriks Perubahan Anggaran Inspektorat Jenderal (REVISI DIPA KE-5)

Kode	Rincian Output	Semula		Menjadi		Perubahan	Keterangan
		Volume	Pagu	Volume	Pagu		
2392.EBD.005	Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	135 Laporan	Rp4.850.000.000	135 Laporan	Rp4.550.000.000	Berkurang sebesar Rp300.000.000	Pergeseran Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Barang Non Operasional terkait pelaksanaan Layanan Manajemen SDM Internal (Kepegawaian dan Diklat)



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA
Jabatan : Inspektur V

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZAL, ST, Sp., QIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat V	80,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	85,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	55,00%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	90,00%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	45,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

1.839.000.000

INSPEKTUR JENDERAL



Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, DESEMBER 2022
INSPEKTUR V



MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA
Jabatan : Inspektur V

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Pertama

MUHAMMAD RIZAL, ST, Sp., QIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT V - INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM: Dukungan Manajemen	
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	78,00%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat V	80,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	85,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	55,00%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil evaluasi BPKP (<i>quality Assurance</i>)	90,00%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	45,00%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

1.839.000.000

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, DESEMBER 2022
INSPEKTUR V



MUHAMMAD RIZAL, S.T., Sp.1, QIA

Matriks Perubahan Anggaran Inspektorat V (s.d REVISI DIPA KE-10)

Kegiatan	Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
SASARAN KEGIATAN 1.5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	5.700.000.000	1.839.000.000

Keterangan:

1. Pergeseran anggaran antar Unit Eselon I sebesar Rp17.433.064 dari Inspektorat Jenderal ke Ditjen Bina Kontruksi dan BPSDM (Anggaran Inspektorat V berkurang sejumlah Rp3.030.000.000,00);
2. Pergeseran anggaran yang masih terblokir berupa *Automatic Adjustment* ke BA BUN sebesar Rp5.000.000.000,00 (Inspektorat V sebesar Rp850.000.000,00);
3. Pergeseran anggaran antar RO/antar akun dalam KRO yang sama (antar Inspektorat) bertambah sebesar Rp19.000.000,00;
4. Surat Inspektur Jenderal Nomor KU 0503-IJ/1524 Tanggal 5 Desember 2022 Hal Usulan Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2022;
5. Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) Nomor S-941/AG/AG.3/2022 Tanggal 9 Desember 2022.